

## PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KEDAH

\*Rizky Setiawan<sup>1</sup>, M. Irfan Rosyadi<sup>2</sup>, Mohd Rizal Safar<sup>3</sup>, Armadiyansyah Ildo<sup>4</sup>, Alif Ikhawan Hamonangan<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIPOL, Universitas Islam Riau

<sup>2</sup>Program Studi Manajemen FEB, Universitas Islam Riau

<sup>3</sup>Schools of Government Universiti Utara Malaysia

<sup>4,5</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fisipol, Universitas Islam Riau

\*Corresponding Author: rizky.ip@soc.uir.ac.id

### Abstrak

Pembangunan berkelanjutan bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah atau perusahaan, namun juga tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan mempunyai peranan yang sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dalam jangka panjang. Partisipasi masyarakat dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan pembangunan, yang pada gilirannya dapat membantu mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Untuk mengatasi permasalahan partisipasi dan pembangunan, diperlukan upaya seluruh pemangku kepentingan dalam merancang suatu pembangunan berdasarkan aspirasi yang biasanya rutin dilakukan dengan kegiatan musyawarah dan reses pembangunan yang dilakukan oleh anggota legislatif. Tujuan partisipasi dalam suatu pembangunan adalah ketepatan sasaran pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Di salah satu wilayah di Malaysia yaitu Kedah, permasalahannya hampir sama terjadi di wilayah di berbagai belahan dunia bahwa kemajuan perkotaan mengurangi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Ini disebabkan oleh banyak hal termasuk aktivitas masyarakat yang sudah tidak ada waktu lagi kegiatan partisipasi pembangunan sehingga pembangunan terlaksana tidak sesuai dengan ketentuan keinginan dan kebutuhan masyarakat tetapi hanya kegiatan rutin pemerintah. Pergeseran ini harus terjadi ditangani oleh pemerintah dalam perkembangan teknologi. Partisipasi dapat tersampaikan melalui media atau aplikasi yang dapat diakses melalui komputer, laptop atau ponsel. Ini Perubahan orientasi pembangunan bermula dari kenyataan bahwa masyarakat miskin dalam pembangunan ekonomi tidak banyak dipromosikan dalam kemajuan pembangunan Harapan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah adanya transfer ilmu pengetahuan terkait partisipasi untuk pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Luaran dari hasil pengabdian masyarakat pada publikasi media nasional dan publikasi pada jurnal.

**Kata Kunci:** Partisipasi, Pembangunan, Kedah

### Abstract

Sustainable development is not solely the responsibility of the government or companies, but also the responsibility of society as a whole. Community participation in sustainable development has a very important role in ensuring that development meets the needs and aspirations of the community, and can improve their quality of life in the long term. Community participation can help increase transparency and accountability in development decision making, which in turn can help prevent corruption and abuse of power. To overcome the problems of participation and development, efforts are needed from all stakeholders in designing development based on aspirations which are usually routinely carried out through deliberation activities and development recesses carried out by legislative members. The aim of participation in development is the accuracy of development targets based on community needs. In one region in Malaysia,

*namely Kedah, the problem is almost the same as in regions in various parts of the world, namely that urban progress reduces community participation in development. This is caused by many things, including community activities where there is no longer time for development participation activities so that development is carried out not in accordance with the wishes and needs of the community but only routine government activities. This shift must occur and be handled by the government in technological development. Participation can be conveyed through media or applications that can be accessed via computer, laptop or cellphone. This change in development orientation stems from the fact that poor communities in economic development are not promoted much in development progress. The hope of this community service activity is the transfer of knowledge related to participation for targeted and sustainable development. Output from community service results in national media publications and publications in journals.*

**Keywords:** Participation, Development, Kedah

## PENDAHULUAN

Keterlibatan masyarakat dalam urusan publik yang merupakan cerminan hak demokrasi inilah yang biasa disebut dengan partisipasi atau biasa disamakan dengan istilah partisipasi masyarakat (public participation, inspraak). Partisipasi masyarakat merupakan bagian sentral dari strategi pembangunan di segala bidang. Jika masyarakat mulai berpartisipasi dalam seluruh aspek pembangunan, mulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga penerimaan manfaat, maka tujuan pembangunan juga akan tercapai dengan sendirinya. Berkaitan dengan hal tersebut, secara teoritis Lothar Gundling mengemukakan beberapa manfaat dan landasan partisipasi masyarakat sebagai berikut: a) Memberikan informasi kepada pemerintah; b) Meningkatkan kemauan masyarakat untuk menerima keputusan; c) Menumbuhkan perlindungan hukum; d) Demokratisasi pengambilan keputusan.

Sejalan dengan pemikiran Lothar Gundling, dalam rangka hak masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelenggarakan Konvensi Internasional di Aarhus Denmark pada tanggal 25 Juni 1998 yang ditandatangani oleh 39 Negara dan Masyarakat Eropa (European Community) dengan hasil Konvensi Aarhus yang memuat 3 (tiga) pilar yang menjamin hak-hak masyarakat dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, yaitu;

Pilar pertama adalah akses terhadap informasi yang pada hakikatnya adalah setiap orang berhak memperoleh informasi yang lengkap, akurat, dan terkini untuk berbagai keperluan. Akses terhadap informasi ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu a) hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari otoritas publik dan kewajiban masyarakat untuk merespon dan memberikan informasi sesuai permintaan masyarakat. Jenis ini disebut hak akses informasi pasif. b) Jenis yang kedua disebut hak aktif atas informasi, yaitu hak masyarakat untuk menerima informasi; dan kewajiban pejabat publik untuk mengumpulkan dan kemudian menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat tanpa diminta.

Pilar kedua, partisipasi dalam pengambilan keputusan (public participation in Decision Making), yaitu pilar demokrasi yang menekankan pada jaminan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam suatu produksi informasi dan juga menjamin bahwa partisipasinya benar-benar terlaksana dalam kenyataan atau praktiknya, dan tidak hanya di atas kertas, melalui penegakan akses terhadap keadilan (access to justice). Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yang pertama adalah hak masyarakat untuk turut serta mempengaruhi pengambilan keputusan atas kegiatan tertentu sesuai dengan kepentingannya. Kedua, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam hal penetapan kebijakan, rencana, dan program pembangunan. Ketiga, turut serta mempersiapkan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pilar ketiga adalah akses terhadap keadilan (access to justice), yaitu akses untuk menegakkan dan memperkuat, baik hak akses informasi maupun hak partisipasi, untuk kemudian memasukkan hak tersebut ke dalam sistem hukum nasional/domestik (domestic legal system). sistem); dan memperkuat penegakan hukum lingkungan hidup nasional/domestik agar dapat diterapkan dengan baik. Yang penting dari pilar ketiga ini adalah tersedianya mekanisme bagi masyarakat untuk menegakkan hukum lingkungan hidup secara langsung. (Pilar keadilan juga memberikan mekanisme bagi masyarakat untuk menegakkan hukum lingkungan hidup secara langsung).

Di salah satu wilayah Malaysia yaitu Kedah, permasalahan yang hampir sama terjadi di wilayah-wilayah di berbagai belahan dunia yaitu kemajuan perkotaan mengurangi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini disebabkan oleh banyak hal antara lain aktivitas masyarakat yang tidak lagi mempunyai waktu untuk kegiatan partisipasi pembangunan sehingga pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat melainkan hanya kegiatan rutin pemerintah. Pergeseran ini harus ditangani oleh pemerintah dalam perkembangan teknologi. Partisipasi dapat disampaikan melalui media atau aplikasi yang dapat diakses melalui komputer, laptop atau telepon genggam. Rumusan ini mungkin akan memudahkan masyarakat yang tidak dapat berpartisipasi karena kendala aktivitas, jarak dan waktu.

## METODE PELAKSANAAN

Cara pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat atau PKM internasional yang dilaksanakan di salah satu wilayah Malaysia yaitu Kedah oleh dosen Universitas Islam Riau adalah: a) Melalui forum diskusi kelompok yang diadakan di Universitas Malaysia Utara, Kedah Malaysia; b) Berbagi pengetahuan tentang partisipasi pembangunan dan pembangunan berkelanjutan antara pemateri dan penonton; c) Tanya jawab tentang permasalahan, konsep, strategi, metode dan analisis dalam meningkatkan partisipasi pembangunan; d) Penerapan berupa rumusan bagaimana penerapannya dalam meningkatkan partisipasi pembangunan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhatian terhadap pentingnya partisipasi masyarakat bagi keberhasilan pembangunan muncul akibat adanya pergeseran orientasi pembangunan dari model pertumbuhan penanaman modal pada tahun 1960an menjadi orientasi pendekatan kebutuhan dasar yang berpusat pada masyarakat pada tahun 1970an. Perubahan orientasi pembangunan ini bermula dari kenyataan bahwa masyarakat miskin dalam pembangunan ekonomi tidak banyak terdorong dalam kemajuan pembangunan. Selain itu, perhatian juga tertuju pada strategi pembangunan lainnya, yakni pembangunan yang tidak hanyamencakup persoalan pemerataan, namun juga penanggulangan kemiskinan. Salah satu model pembangunan berbasis masyarakat dilakukan dengan memadukan peran pemerintah dan partisipasi masyarakat secara harmonis dan proporsional. Tujuan pengembangan model ini antara lain untuk: a) Meningkatkan produksi dan produktivitas; b) Meningkatkan pemerataan perolehan sumber pendapatan, pelayanan pemerintah, dan pelayanan publik; c) Memberikan kesempatan kerja; d) Meningkatkan harga diri dan rasa percaya diri; e) Menumbuhkan keterlibatan masyarakat yang tulus; f) Memperkuat titik keseimbangan pengelolaan sumber daya alam antara pemanfaatan dan pelestarian.

Menurut Zamor, jika semakin meningkatnya perhatian terhadap partisipasi dalam setiap proses pembangunan mengutamakan pendekatan bottom-up, maka pengelolaan program justru telah menggeser pola orientasinya, yaitu dari fokus masukan (gravity input) ke fokus hasil (gravitasi hasil) yang mengakibatkan penerima manfaat potensial menempati posisi penting dan strategis. Padahal, Slamet M. menegaskan, partisipasi masyarakat mutlak diperlukan demi keberhasilan pembangunan. Tanpa partisipasi masyarakat khususnya dalam memanfaatkan hasil pembangunan berarti masyarakat tidak menerima peningkatan kesejahteraan, padahal pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Tanpa partisipasi masyarakat, setiap proyek pembangunan pasti dianggap tidak berhasil. Dengan demikian, partisipasi masyarakat merupakan bagian sentral dari strategi pembangunan yang modern dan demokratis. Jika masyarakat mulai berpartisipasi dalam seluruh aspek pembangunan, baik dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi, maupun pada tahap penerimaan manfaat, maka asumsinya tujuan pembangunan juga harus tercapai.

Pembangunan berkelanjutan yang menekankan perlunya partisipasi masyarakat agar pembangunan dapat berjalan sesuai tujuan yang diinginkan masyarakat. Pembangunan berkelanjutan tidak harus diartikan sebagai pembangunan yang berlangsung lancar, mantap tanpa hambatan. Perkembangan masyarakat selalu berjalan bergelombang, naik turun. Disebut berkelanjutan apabila mampu mendobrak atau menghindari hambatan-hambatan yang ada dan melangkah lebih jauh ke tingkat keseimbangan yang lebih tinggi. Pembangunan berkelanjutan yang dikenal dengan SDGs (Sustainable Development Goals) merupakan agenda pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan global. SDGs merupakan perjanjian pembangunan baru yang menggantikan MDGs (Millennium Development Goals). SDGs berlaku sejak tahun 2015-2030 yang disepakati oleh 190 negara yang memuat 17 tujuan dan 169 target pembangunan. SDGs berbicara tentang pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini didorong oleh fakta bahwa sejak penerapan desentralisasi di Indonesia, dua pertiga kualitas hidup masyarakat sangat ditentukan oleh baik buruknya kinerja pemerintah daerah. SDGs dibangun dari bawah ke atas dan bersifat partisipatif.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih tergolong lemah. Kondisi ini disebabkan penerapan paradigma tersebut masih dalam masa transisi menuju demokrasi. Masyarakat sudah terbiasa memobilisasi partisipasi seperti yang digunakan pada masa Orde Baru dan Orde Lama. Menurut Wahyudi (2006:7), proses perencanaan pembangunan yang dilakukan pada dasarnya merupakan proses yang cukup sederhana, dan siapa pun yang terlibat sebenarnya dapat menyusun rencana tersebut asalkan mereka bertanggung jawab.

Proses perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah: (1) Proses politik; (2) Proses teknokratis; (3) Proses partisipatif; (4) Proses bottom-up dan top-down. Menurut Abe (2005:92-94) substansi penting untuk melihat keberhasilan dan kegagalan perencanaan wilayah antara lain: Nilai-nilai dan prioritas dalam rangka mencapai tujuan perencanaan yang memerlukan motivasi individu dan sosial manusia.

Konsep pembangunan partisipatif yang dikemukakan oleh Nasrun (2008) adalah pembangunan yang dilakukan oleh berbagai komponen publik (pemerintah, swasta, dan lembaga masyarakat non-pemerintah) secara sistematis. Lebih lanjut disebutkan bahwa kepentingan sistemik berbagai komponen publik dalam pembangunan daerah memerlukan langkah penyusunan portofolio yang didahului dengan proses evaluasi internal dengan menggunakan analisis SWOT.

Kedah merupakan wilayah berkembang. Perlu adanya partisipasi pembangunan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Melalui partisipasi dalam pembangunan dirasakan masyarakat akan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan manfaatnya. Karena keterbatasan ruang dan waktu bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, maka perlu adanya inovasi berupa pemanfaatan informasi dan teknologi yang biasa diterapkan oleh E-GOV dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunan di era penerapan e-Government, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

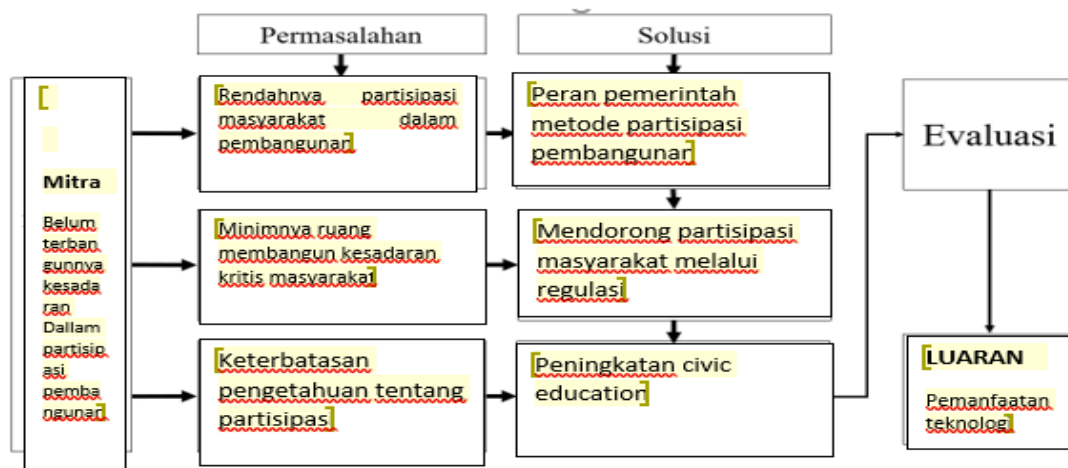
Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), melalui partisipasi akan menghasilkan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan harapan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan ditemukan partisipasi masyarakat belum terlaksana dengan baik atau masih pada tingkat partisipasi yang paling rendah, hal ini terlihat pada pelaksanaan Musrenbang mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan kota yang masih sebatas agenda wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, jika dilihat dari partisipasi peserta Musrenbang memang menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu, namun jika dilihat dari rumusan usulan program dan kegiatan masih didominasi oleh pejabat pemerintah dan kelompok berpengaruh.

Penerapan e-Government yang telah diamanatkan kepada seluruh pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan ruang partisipasi luas bagi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Saat ini sudah cukup banyak daerah yang menerapkan e-Government dalam menjalankan kegiatan pemerintahan sebagai wujud komitmen mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam penerapan e-Government khususnya e-Musrenbang terkait perencanaan, yaitu: sistem yang belum terintegrasi; penjabaran Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ke ruang digital belum terlaksana dengan baik; dukungan fiskal dan infrastruktur masih sangat terbatas.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan e-Musrenbang, dilakukan hal-hal sebagai berikut: internalisasi SPPN di masyarakat; partisipasi masyarakat secara berjenjang sesuai kebutuhan; reformasi birokrasi.





IPEKES (Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni) Pengabdian Masyarakat merupakan konsep yang mengintegrasikan pengetahuan ilmiah, teknologi, dan seni untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Pengabdian Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memberikan solusi nyata terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini dilakukan melalui penerapan pengetahuan dan teknologi yang relevan serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengembangan dan implementasi solusi.



gambar.1. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

## SIMPULAN

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan mempunyai peranan yang sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dalam jangka panjang. Partisipasi masyarakat dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan pembangunan, yang pada gilirannya dapat membantu mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Untuk mengatasi permasalahan partisipasi dan pembangunan, diperlukan upaya seluruh pemangku kepentingan dalam merancang suatu pembangunan berdasarkan aspirasi yang biasanya rutin dilakukan dengan kegiatan musyawarah dan reses pembangunan yang dilakukan oleh anggota legislatif. Tujuan partisipasi dalam suatu pembangunan adalah ketepatan sasaran pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Di salah satu wilayah di Malaysia yaitu Kedah, permasalahannya hampir sama terjadi di wilayah di berbagai belahan dunia bahwa kemajuan perkotaan mengurangi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Ini disebabkan oleh banyak hal termasuk aktivitas masyarakat yang sudah tidak ada waktu lagi kegiatan partisipasi pembangunan sehingga pembangunan terlaksana tidak sesuai dengan ketentuan keinginan dan kebutuhan masyarakat tetapi hanya kegiatan rutin pemerintah. Pergeseran ini harus terjadi ditangani oleh pemerintah dalam perkembangan teknologi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan limpahan karunia kegiatan Pengabdian Intentional ini dapat berjalan dengan lancar. Ucapan terimakasih kepada mitra Universitas Utara Malaysia (UUM) di Kedah Malaysia yang telah dapat bekerjasama dengan Universitas Islam Riau dalam program Pengabdian International. Dan terimakasih kepada seluruh

tim yang terlibat dalam kegiatan Pengabdian International, tanpa adanya bantuan dan dedikasi yang telah diberikan mungkin kegiatan ini tidak berjalan lancar.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Cater, Gwendolen, Peranan Pemerintah Dalam Masyarakat Masa Kini, dalam Meriam Budiardjo (ed), Masalah Kenegaraan, Gramedia, 1980
- Jurnal administrasi publik volume 11 nomor 2, oktober 2014 issn 1412-7040 53 partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota yang berkelanjutan dan berkeadilan, aseparlan yusuf.
- Jurnal Manajemen Pembangunan Vol. 5, No. 2/ Desember 2018: 95 – 115, Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dalam Penerapan E-Musrenbang, Agung Manghayu
- Mansour Fakih, Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi, Pustaka Pelajar, Cetakan 1, 2001.
- Mulyarto Tjokrowinoto, Isu dan Kebijakan Pembangunan, Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 2000
- Zamor G.C, Public Participation in Development Planning and Management, cases from Africa and Asia, West View, Press, London, 1985

